

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Teori Pandangan Berbasis Sumber Daya (*Resource-based View Theory*)

Teori Pandangan Berbasis Sumber Daya (*Resource-based View Theory*) awal kali ditemukan wernerfelt (1984). Konsep *Resourced-based View* menilai bahwasanya sumber daya serta kesanggupan perusahaan sangat penting untuk perusahaan, dikarenakan ia menjadi asas dari kemampuan daya saing dan kinerja perusahaan (Essel et al., 2019). Sumber daya ini termasuk keuangan, manusia (kompetensi), teknologi, pemasaran, dan sumber daya fisik. Sumber daya menurut *Resource-Based Theory* adalah aspek-aspek perusahaan yang mempengaruhi profitabilitas, kemajuan, dan kinerjanya.

Konsep *Resourced-based View* adalah strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui penggunaan sumber daya yang ada guna memperoleh atau mempertahankan persaingan keuntungan dari waktu ke waktu.

2.2 Kinerja UMKM

2.2.1 Pengertian Kinerja UMKM

Menurut Costa Melo et al., (2023) kinerja UMKM merupakan perolehan evaluasi kinerja perusahaan yang diraih orang ataupun kelompok melalui pembagian aktivitas berwujud kewajiban serta peranan dengan tenggat waktu terkhusus melalui standar perusahaan. Kinerja bisnis dalam UMKM bisa ditinjau melalui kesuksesan perusahaan melalui mutu produk, pembaruan, SDM,

manajemen, konsumen, serta finansial, membuktikan bahwasanya perusahaan mempunyai orientasi perkembangan serta melihat kesempatan secara terus menerus.

Menurut Gunawan *et al.*, (2023) kinerja adalah pekerjaan yang dicapai oleh seseorang atau organisasi untuk menyelesaikan tanggung jawab yang dialokasikan kepada pelaku usaha, berdasarkan keterampilan pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Gunawan *et al.*, (2023) juga mengatakan bahwa kinerja ialah keseluruhan perolehan ataupun tingkatan kesuksesan yang dimiliki individu dalam kurun waktu tertentu saat melaksanakan aktivitas melalui tanggung jawab, semisal hasil kerja dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan disepakati bersama.

Menurut Lontchi *et al.*, (2023) kinerja UMKM dapat diukur dan dinilai dari ukuran perusahaan, umur perusahaan, tenaga kerja terampil, lokasi, jenis manufaktur, kepemilikan, kerjasama, dan penanaman modal asing. Kinerja UMKM juga dapat ditingkatkan dengan kebijakan pada jasa keuangan, fasilitas kredit, dan manajemen pemasaran. Pengukuran dari kinerja bisnis mengedepankan aspek profitabilitas, produktivitas, dan persepsi pasar dari pemilik/pengelola UMKM tentang kesesuaian pengukuran. Pencapaian bisnis, serta tingkat kepuasan tindakan terhadap pencapaian kinerja.

2.2.2 Indikator Kinerja UMKM

Susan, (2020) menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja usaha diperlukan indikator sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan penjualan.

Pertumbuhan penjualan adalah perubahan dengan kenaikan ataupun menurunnya penjualan dari periode ke periode yang bisa ditinjau melalui pelaporan laba rugi. Perusahaan yang optimal bisa ditinjau melalui penjualannya dari periode ke periode yang terus menaik.

b. Pertumbuhan modal.

Pertumbuhan modal merujuk pada meningkatnya nilai permodalan yang dilakukan investasi. Hal tersebut meningkat karena naiknya harga pasar. Pertumbuhan modal dapat memberikan dorongan perusahaan menghasilkan lebih melimpah produk.

c. Pertumbuhan tenaga kerja.

Perusahaan ataupun organisasi tidak bisa tercapai tujuannya dengan baik jika keproduktivitasan bekerja karyawan minim. Suatu organisasi atau perusahaan dikatakan mempunyai keproduktivitasan tinggi apabila bisa menggunakan sumber daya dengan baik.

d. Pertumbuhan laba.

Pertumbuhan laba ialah perubahan dalam pelaporan finansial tiap tahun. Bisa diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan laba ialah sebuah kenaikan keuntungan bersih yang dijelaskan melalui persentase yang dihasilkan perusahaan pada suatu periode hingga bisa merepresentasikan perolehan kinerja finansial perusahaan pada pengelolaan aset yang dipunyai.

2.3 Literasi Keuangan

2.3.1 Pengertian Literasi Keuangan

Menurut Zaniarti et al., (2022) literasi keuangan ialah seperangkat kemampuan yang memberikan kemungkinan individual guna membentuk ketetapan yang terinformasi serta efisien untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi kerugian waktu dan uang. Kemudian, peranan lembaga keuangan, industri, serta pengusaha dalam mengembangkan solusi sisi penawaran yang memberikan peningkatan literasi keuangan serta meminimalisir ketidaksetaraan di seluruh kelompok demografis.

Menurut Susan, (2020) individual yang mempunyai kemampuan literasi keuangan bisa mengatur uang mereka secara lebih efektif, membuat keputusan investasi yang tepat, mengubah perilaku menabung, dan memanfaatkan produk keuangan dan layanan baru yang tersedia. Penelitian dan praktik literasi keuangan wajib berupaya untuk menentukan bagaimanakah meningkatkan efektivitas pendidikan finansial dengan desain serta penjelasan yang lebih bijak. Literasi keuangan terdiri mencakup konsep, termasuk pengetahuan produk finansial dan kesadaran, pemahaman lembaga keuangan dan keterampilan keuangan, dan keuangan kemampuan perencanaan dan manajemen.

Berdasarkan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 3/POJK/2023), literasi keuangan didefinisikan sebagai informasi, kecakapan, serta kepercayaan, yang memberi pengaruh tindakan guna memberikan peningkatan mutu pengambilan keputusan serta tata kelola finansial untuk meraih kemakmuran. Literasi keuangan adalah salah satu aspek terpenting yang wajib dimiliki tanpa

batasan usia di era digital saat ini. Makin tinggi tingkatan literasi keuangan seseorang, sehingga tercapainya tujuan untuk melakukan perencanaan serta pemilihan produk serta layanan finansial yang lebih baik juga akan semakin besar.

Bisa diambil kesimpulan melalui beberapa gagasan tersebut bahwasanya literasi keuangan ialah informasi, pengertian serta kecakapan individu terkait finansial terhadap produk dan pelayanan finansial guna mengambil keputusan yang benar hingga terhindarkan melalui risiko maupun permasalahan finansial.

2.3.2 Tujuan Literasi Keuangan

Selaras terhadap (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 3/POJK/2023) literasi keuangan mempunyai tujuan berjangka Panjang untuk semua golongan masyarakat, yaitu:

- a. Memberikan peningkatan literasi keuangan individu yang sebelumnya tidak melek pengetahuan kepada melek pengetahuan dengan baik.
- b. Memberikan peningkatan total pengguna produk serta pelayanan jasa finansial
- c. Khalayak luas bisa menetapkan produk serta pelayanan jasa finansial yang selaras terhadap keperluan.
- d. Dapat menentukan serta menggunakan produk serta pelayanan jasa finansial yang selaras terhadap kebutuhan; mempunyai kesanggupan untuk menjalankan perancangan finansial secara lebih maksimal.
- e. Terhindarkan dari kegiatan investasi dalam instrument finansial yang tidaklah jelas.

- f. Memperoleh informasi terkait manfaat serta risiko produk serta pelayanan jasa finansial.

Literasi keuangan khalayak mengalami peningkatan sehingga kemudian memberi manfaat yang besar untuk bidang jasa finansial sehingga makin banyak khalayak yang akan menggunakan produk serta pelayanan jasa finansial.

2.3.3 Fungsi Literasi Keuangan

Literasi keuangan berfungsi sebagaimana (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 3/POJK/2023), fungsi dari ditingkatnya literasi keuangan ialah mempunyai kewajiban diantaranya :

- a. Melakukan perencanaan serta menjalankan sebuah aktivitas untuk memberikan peningkatan literasi keuangan.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap diselenggarakannya aktivitas peningkatan literasi keuangan yang telah dilaksanakan pelaksana usaha jasa finansial.
- c. Memberikan masukan pada unit bisnis yang memiliki tugas menjalankan riset dan perkembangan produk serta pelayanan jasa finansial yang selaras terhadap yang diperlukan pelanggan serta selaras terhadap kesanggupan yang dipunyai pelanggan.

2.3.4 Peranan Literasi Keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Literasi mempunyai peran yang begitu krusial saat sedang melakukan pengajuan kredit kepada lembaga finansial, dikarenakan :

1. UMKM melalui tingkatan literasi yang tinggi bisa meminimalisir kegagalan pasar yang disebabkan terdapatnya informasi asimetri antar debitur dan lembaga finansial.
2. UMKM yang mempunyai tingkatan literasi yang tinggi dapat mengerti urgensinya mengerti beragam pilihan pendanaan yang selaras terhadap keperluan dan mekanisme pembayaran ataupun pelunasan peminjaman yang memberikan keuntungan.
3. Literasi keuangan mempunyai peran krusial untuk UMKM saat melaksanakan peminjaman aset pribadi menjadi jaminan. Tiap UMKM wajib melakukan penimbangan risiko serta manfaat pada tiap pilihan finansial mereka.

2.3.5 Indikator Literasi Keuangan

Indikator yang dipakai menjadi instrumen ini menurut survei literasi keuangan yang bisa dipakai melalui latar belakang yang begitu berbeda pada beragam bangsa yang mengikutkan 30 bangsa serta tolak ukur itu digagas OECD dalam survei kedua periode 2016. *International Network on Financial Education* pada (Anshika & Singla, 2022) adalah :

- a. Pengetahuan keuangan

Adalah unsur krusial melalui literasi keuangan sosok individu untuk menolong mereka dalam perihal mengomparasikan produk serta layanan lembaga finansial supaya mereka dapat membentuk keputusan finansial yang benar serta terarah.

b. Perilaku keuangan

Bukan hanya wawasan finansial yang krusial pada perihal literasi keuangan, namun tindakan pelangganlah yang ujungnya membentuk finansial, meliputi berjangka panjang ataupun pendek. Dikarenakan mayoritas khalayak belumlah menunjukkan tindakan yang diperlukan guna lebih kuat dari goncangan, dengan wujud tindakan menabung dengan aktif, berfikir kembali sebelum melakukan pembelian suatu, melakukan pembayaran tagihan tepat pada waktunya, memperlihatkan dengan bersama masalah finansial serta mempunyai tujuan berjangka panjang.

c. Sikap keuangan

Tolak ukur ini memiliki fokus kepada persoalan yang berkaitan terhadap bagaimanakah informan dalam tindakan mendahulukan kehendak berjangka pendek dibanding keinginan berjangka panjang ataupun membentuk rancangan finansial berjangka panjang.

2.4 Inklusi Keuangan

2.4.1 Pengertian Inklusi Keuangan

Chen & Yuan (2021) menyatakan inklusi keuangan mengacu pada akses ke produk serta pelayanan finansial yang memberikan manfaat dan terjangkau semisal pembayaran, simpanan, asuransi, serta pinjaman oleh individu dan organisasi. Dalam industri keuangan tradisional, akses ke produk dan layanan moneter sebagian besar diperoleh melalui bank dan perusahaan keuangan lainnya.

Menurut Kass-Hanna et al., (2022) inklusi keuangan berdampak ketika mereka yang memiliki akses ke layanan keuangan menggunakannya secara konsisten dan bertanggung jawab untuk menyimpan, meminjam, dan mentransfer uang. Perilaku ini yang membangun ketahanan dalam menghadapi kerentanan dan mengarah pada hasil akhir pembangunan.

Menurut Shaikh et al., (2023) menyatakan inklusi keuangan adalah pembahasan yang menyeluruh untuk melenyapkan beragam gangguan berkaitan pemakaian serta pemanfaatan pelayanan jasa finansial oleh khalayak.

SNKI BI mendefinisikan inklusi keuangan menjadi wewenang untuk tiap individu guna mengakses serta memperoleh pelayanan optimal melalui lembaga finansial dengan informatif serta tepat pada waktunya, melalui biaya yang terjangkau, dan tetaplah menjaga kenyamanan serta hormat pada harkat serta martabatnya.

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 3/POJK/2023) terkait Peningkatan Literasi serta Inklusi Keuangan pada Bidang Jasa Finansial Untuk Khalayak serta Pelanggan. OJK menghimbau konsumen untuk menggunakan kredit. Keterkaitan dengan beragam lembaga, barang, serta pelayanan finansial yang disesuaikan terhadap keperluan serta kesanggupan khalayak guna memberikan peningkatan kemakmuran khalayak didefinisikan menjadi tersedianya keterhubungan beragam lembaga, barang, serta pelayanan finansial yang disesuaikan terhadap keperluan serta kesanggupan masyarakat guna memberikan peningkatan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan beragam definisi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pelayanan finansial kepada beragam lembaga, produk ataupun pelayanan finansial yang bisa dijangkau secara mudah, nyaman serta aman oleh semua lapisan masyarakat diselaraskan terhadap keperluan serta kesanggupan khalayak untuk meraih kemakmuran.

2.4.2 Tujuan Inklusi Keuangan

Untuk melakukan peningkatan literasi serta inklusi keuangan untuk pelanggan ataupun masyarakat menurut (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 3/POJK/2023) tujuan inklusi keuangan ialah :

- a. Terdapat peningkatan akses khalayak pada lembaga, produk, serta pelayanan jasa finansial pelaksana usaha jasa finansial.
- b. Terdapat peningkatan ketersediaan produk serta/ataupun pelayanan jasa finansial oleh pelaksana usaha jasa finansial yang selaras terhadap keperluan serta kesanggupan khalayak.
- c. Terdapat peningkatan pemakaian produk serta/ataupun pelayanan jasa finansial yang selaras terhadap keperluan serta kesanggupan khalayak.
- d. Terdapat peningkatan mutu pemakaian produk serta pelayanan jasa finansial selaras terhadap keperluan serta kesanggupan khalayak.

Tujuan inklusi keuangan itu bisa diraih melalui SNKI. Menurut (Peraturan Presiden Perpres Nomor 114 Tahun 2020) terkait SNKI “keuangan inklusif adalah unsur krusial pada tahapan inklusi sosial serta perekonomian yang memiliki peran guna memberikan dorongan perkembangan ekonomi, membentuk kestabilan sistem finansial, memberikan dukungan program pengentasan kemiskinan, dan

meminimalisir kesenjangan antar individual serta antar wilayah untuk menciptakan kemakmuran khalayak”.

2.4.3 Pilar dan Fondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Guna mewujudkan terbentuknya sistem finansial yang inklusif untuk meraih kemakmuran khalayak dibutuhkan sistem finansial yang inklusif dan stabil. Di bawah ini lima pilar serta fondasi melalui SNKI (Peraturan Presiden Perpres Nomor 114 Tahun 2020):

a. **Pilar Edukasi Keuangan**

Memiliki tujuan guna memberikan peningkatan wawasan serta kesadaran khalayak terkait lembaga finansial formal. Pilar edukasi keuangan mencakup segi fasilitas, manfaat serta risiko, wewenang serta tanggung jawab dan guna memberikan peningkatan kecakapan khalayak pada perancangan serta kecakapan pada tata kelola finansial.

b. **Pilar Hak Properti Masyarakat**

Memiliki tujuan guna memberikan peningkatan akses kredit/pendanaan khalayak pada lembaga finansial formal yang bisa dilaksanakan guna memberdayakan khalayak.

c. **Pilar Produk, Intermediasi dan Saluran Distribusi**

Pilar berikut memiliki tujuan guna meluaskan akses serta jangkauan khalayak beragam kelompok untuk memperoleh pelayanan finansial guna mencukupi keperluan.

d. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Memiliki tujuan guna memberikan peningkatan pengelolaan serta transparansi layanan publik pada pendistribusian dana pemerintahan dengan non tunai.

e. Pilar Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen

Memiliki tujuan guna memberikan perasaan aman pada khalayak saat menjalankan pelayanan finansial dan mempunyai pedoman transparansi, sikap adil, andal, rahasia serta keamanan informasi serta data pelanggan dengan sederhana, cepat serta melalui biaya yang bisa dijangkau.

Lima pilar tersebut dalam meraih keuangan yang inklusif diberikan dukungan melalui tiga fondasi di bawah ini :

a. Kebijakan dan regulasi yang kondusif

Fondasi ini memiliki peran pada kontribusi dorongan kebijaksanaan serta regulasi guna keuangan inklusif.

b. Teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital dan infrastruktur finansial yang memberikan dukungann

Peranan teknologi begitu krusial guna memberi dorongan serta meminimalisir informasi asimetris yang menjadi gangguan serta dukungan infrastruktur ketika mengakses pelayanan finansial.

c. Organisasi serta mekanisme implementasi yang efisien

Kebermacam-macam pelaksana keuangan inklusif membutuhkan koordinasi serta mekanisme penyelenggaraan SNKI dengan bersamaan serta terpadu guna memberikan dukungan peraih keuangan inklusif pada Indonesia.

Dalam mengimplementasikan keuangan inklusif sehingga pilar serta strategi wajib bisa dimaksimalkan hingga keuangan inklusif mempunyai asas yang kokoh serta bisa meraih inklusi keuangan yang konsisten serta terus mengalami peningkatan seiring terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.4.3 Indikator Inklusi Keuangan

Guna mendapati sejauh manakah pertumbuhan aktivitas inklusi keuangan dibutuhkan sebuah satuan kinerja. Berdasarkan beberapa literasi, tolak ukur yang bisa menjadi ukuran suatu bangsa pada perkembangan inklusi keuangan berdasarkan OECD (2021) terdapat 5 indikator. Indikator itu yang kemudian peneliti pakai pada pengukuran tingkatan inklusi keuangan dikarenakan tolak ukur yang menjadi kuesioner itu telah dipakai pada beberapa bangsa melalui kondisi serta karakteristik informan yang berbeda. Pertanyaan disusuk berfokus kepada:

a. Tabungan/Investasi

Tabungan/Investasi di mana manfaatnya guna melakukan identifikasi produk finansial yang sekarang ini dipunyai informan. Tolak ukur ini bisa melakukan eksplorasi benarkah pelanggan paling tidak tersadar terhadap produk finansial yang ada pada nasional, apakah mereka menentukan referensi produk finansial.

b. Produk Pembayaran

Bertujuan sebagai alat pada pembayaran sebuah barang ataupun pelayanan. Tolak ukur ini pun bisa melakukan eksplorasi apakah pelanggan tersadar terhadap produk finansial yang tersedia dengan nasional. Produk finansial pun makin mengalami perkembangan melalui terdapatnya digitalisasi

perekonomian sebagaimana pada peningkatan inklusi keuangan ialah melalui *financial technology*.

c. Pinjaman Kredit

Tolak ukur ini dipakai guna meninjau seberapa banyak khalayak yang sudah memakai penyediaan uang ataupun tagihan. Peminjaman kredit adalah perjanjian peminjaman antar pihak perbankan dan yang lainnya yang mengharuskan pihak peminjam membayarkan bunga sebagai ketidakselarasan.

d. Pemahaman Produk Keuangan

Bukan hanya mempunyai produk keuangan, rasa sadar terhadap pemakaian produk selaras terhadap keperluan pun penting. Rasa sadar ini kemudian memberikan pencegahan kekeliruan penentuan serta menolong penyedia produk finansial guna mendapati permintaan melalui khalayak.

2.5 *Financial Technology* (Teknologi Finansial)

2.5.1 Pengertian *Financial Technology*

Financial Technology atau *fintech* menurut Chinoda & Mashamba, (2021) ialah pemakaian teknologi sistem finansial yang memberikan hasil produk, pelayanan, teknologi serta model berbisnis baru dan memberikan dampak kepada kestabilan moneter, kestabilan sistem finansial, efektivisasi, kelancaran, rasa aman serta keandalan mekanis pembayaran. Pada aturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Terkait Pelaksanaan Pemrosesan Transaksi pembayaran diutarakan bahwasanya *fintech* memiliki tujuan guna mencukupi keperluan masyarakat

meliputi dalam mekanis pembayaran meliputi melalui segi instrumen, pelaksana, sistem ataupun infrastruktur pelaksanaan pemrosesan pembayaran.

Menurut Fasano & Cappa, (2022) menyatakan *fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai layanan yang dibantu oleh teknologi keuangan yang berbeda atau organisasi yang berbeda yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan keuangan yang didukung oleh solusi teknologi informasi.

Berdasarkan BI sendiri *fintech* adalah perolehan melalui penyatuan antar jasa finansial dan teknologi yang kemudian memberikan perubahan model berbisnis dari konvensional kepada moderat, yang pertamanya saat bertransaksi dengan pembayaran wajib bertemu ataupun bertatap muka serta membawa sejumlah uang, tetapi sekarang melalui terdapatnya *fintech* bisa melaksanakan aktivitas bertransaksi ataupun pembayaran berjarak jauh secara mudah dengan tidak wajib bertatap muka serta bisa dilaksanakan dengan hitungan detik saja.

FinTech memberi kemudahan untuk pelanggan saat menggunakan beragam pelayanan jasa finansial dengan digital, semisal: membayar, meminjam, berinvestasi, serta asuransi. Melalui pemakaian *fintech*, pelanggan bisa bertransaksi dengan tidak wajib bertemu, mendapatkan peminjaman dengan tidak wajib mendatangi kantor cabang perbankan, menentukan, serta mendapati produk finansial yang paling selaras terhadap keperluan kita, melakukan investasi dengan mudah dan mendapatkan masukan perancangan finansial.

Menurut beberapa definisi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya *fintech* adalah pembaruan pelayanan pada perindustrian finansial dengan basis digital diikuti melalui pertumbuhan teknologi yang memberi pelayanan finansial dengan optimal, ekonomis serta mudah dijangkau khalayak. Adanya *fintech* dikarenakan terdapatnya perubahan *life style* masyarakat sekarang ini yang dipimpin pemakai TI, keperluan kehidupan yang serba bisa serta bisa memberikan peningkatan intensitas pemakaian layanan finansial.

2.5.2 Kelebihan dan Kelemahan *Financial Technology*

Fintech pada penerapannya mempunyai kelebihan serta kelemahan serta perihalnya menjadi atensi guna perbaikan yang lebih maksimal. Otoritas Jasa Keuangan, (2020) menjelaskan kelebihan serta kelemahan *fintech*. Kelebihan *fintech* ialah:

- a. Memberikan pelayanan khalayak Indonesia yang belumlah bisa dilayani oleh perindustrian finansial tradisional karena ketatnya aturan bank serta terdapatnya keterbatasan industri bank tradisional saat melayani khalayak pada wilayah tertentu.
- b. Sebagai preferensi pendanaan selain layanan industri finansial tradisional yang mana khalayak membutuhkan preferensi pendanaan yang lebih demokratis serta transparansi.

Bukan sekedar memiliki kelebihan *fintech* pun mempunyai kelemahan ialah:

- a. *FinTech* adalah pihak yang tidaklah mempunyai lisensi guna melakukan pemindahan dana serta kurang mapan pada pelaksanaan usahanya melalui modal yang besar apabila dikomparasikan terhadap bank.

- b. Ada sebagian perusahaan *fintech* belumlah mempunyai kantor fisik serta minimnya pengalaman pada penyelenggaraan prosedur berkaitan mekanis keamanan serta keintergritasan produknya.

2.5.3 Tantangan dan Risiko *Financial Technology*

FinTech adalah pelayanan finansial yang terus berkembang berdasarkan pertumbuhan teknologi. Pertumbuhan *fintech* pun memberikan hasil beragam inovasi finansial, sehingga amat krusial guna mempunyai wawasan serta pengertian yang bagus pada *fintech* hingga bisa mengatasi kendala serta risikonya. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2020), kendala yang ditemui perindustrian *fintech* ialah:

- a. Aturan untuk mendorong perkembangan *fintech*. Perihal ini berkaitan terhadap bagaimana mengadopsi aturan berkaitan tanda tangan serta pemakaian dokumen dengan digital hingga bisa memaksimalkan potensi yang dipunyai perindustrian *fintech*.
- b. Koordinasi antar Institusi serta Kementerian Berkaitan guna memaksimalkan potensi *fintech* terhadap lingkungan berbisnis yang menyeluruh, sehingga butuh pula dorongan melalui beragam kementerian serta lembaga berkaitan.

2.5.4 Klasifikasi *Financial Technology*

Klasifikasi *fintech* menurut laporan *Annual Member Survey 2019/2020* oleh Asosiasi *FinTech* Indonesia (AFTECH., 2019) meliputi empat model berbisnis pokok:

- a. Pembayaran Digital Berdasarkan PBI No. 18/40/ PBI/2016 mencakup uang elektronik, *eWallet*, *remittance*, *payment gateway*, solusi dengan POS, *payment agent network*, *bill payment*, serta *payment issuer support*.
- b. Peminjaman Online Berdasarkan POJK No. 3/POJK/2023 meliputi peminjaman *off-balance sheet* pada pelanggan serta pelaksana bisnis dan peminjaman *on-balance sheet* pada pelanggan.
- c. Tekfin dalam klasifikasi IKD. Menurut POJK No. 13/POJK.02/2018, IKD didefinisikan menjadi kegiatan pembaharuan tahapan berbisnis, model berbisnis, serta instrumen finansial yang memberi nilai tambah terbaru pada bidang jasa finansial melalui mengikutkan ekosistem digital.

2.5.5 Indikator *Financial Technology*

Menurut Senyo & Osabutey (2020), ada beberapa tolak ukur yang bisa dipakai guna melakukan pengukuran *financial technology* ialah:

1. Pengetahuan *Financial Technology*
Pengetahuan dasar pengguna sebelum menggunakan layanan *financial technology*.
2. Pengetahuan serta penguasaan produk-produk *financial technology*
Pengetahuan dan pemahaman produk-produk *financial technology* agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.
3. Persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*)
Persepsi Kegunaan guna melakukan pengukuran niat bertindak pada pemakaian sebuah sistem informasi mencakup dimensi yang berhubungan

terhadap keefisienan, keefektivitasan kegunaan pada peningkatan kinerja serta kegunaan dalam memberikan jawaban keperluan informasi

4. Persepsi Kemudahan penggunaan (*Percived Ease of Use*)

Indikator ini didefinisikan menjadi sejauh manakah individual yakin bahwasanya memakai sebuah teknologi dapat terbebas dari usaha. Dimensi yang berhubungan terhadap tolak ukur ini ialah kefleksibilitas, kemudahan guna berkomunikasi, kemudahan dipakai serta kemudahan dipelajari

2.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha profitabel kepunyaan individual maupun lembaga usaha individual dengan modal dan karakteristik tertentu. UMKM bertujuan untuk menumbuhkembangkan usahanya guna membangun ekonomi bangsa selaras terhadap demokrasi perekonomian yang adil (UU RI No. 8 Tahun 2008 Terkait UMKM). UMKM berperan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi karena potensi yang diakui dengan baik dan dihargai secara luas, berkontribusi menghasilkan sumber lapangan kerja dan pendapatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak dapat diremehkan di seluruh dunia (Gao et al., 2023).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pada Bab 1 Pasal 1 terkait UMKM yaitu :

1. Usaha mikro ialah usaha profitabel milik individu ataupun lembaga individual yang mencukupi karakteristik usaha mikro seperti yang dijelaskan pada Perundang-Undangan ini.

2. Usaha kecil ialah usaha perekonomian profitabel yang independen, yang dilaksanakan individu ataupun lembaga yang bukanlah anak perusahaan maupun cabang yang dipunyai, ataupun menjadi bagian meliputi dengan langsung maupun tidak melalui usaha menengah ataupun besar yang mencukupi karakteristik usaha kecil semisal yang dimaksudkan pada Perundang-Undangan ini.
3. Usaha menengah adalah usaha perekonomian profitabel yang bebas, yang dijalankan individual maupun dengan lembaga usaha yang bukanlah anak perusahaan maupun cabang yang dimiliki, maupun menjadi bagian meliputi langsung ataupun tidaklah langsung melalui usaha kecil ataupun besar melalui total harta bersih ataupun perolehan penjualan tahunan seperti dijelaskan pada Perundang-Undangan ini.

2.6.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pada Bab IV pasal 6, kriteria UMKM ialah :

1. Usaha Mikro
 - a. Aset tidak sampai Rp 50.000.000,00 serta mempunyai harga bersih tidak sampai ataupun sama dengan Rp 50.000.000,00
 - b. Omset tidak sampai Rp 300.000.000,00 serta mempunyai perolehan penjualan setiap tahun tidak melebihi Rp 300.000.000,00
2. Usaha Kecil

- a. Aset melebihi Rp 50.000.000,00 tidak sampai ataupun sama dengan Rp 500.000.000,00 serta mempunyai harta bersih melebihi Rp 50.000.000,00 hingga terbanyak Rp 500.000.000,00 tidaklah mencakup gedung usaha.
 - b. Omset dibawah Rp 300.000.000,00 melebihi ataupun sama dengan Rp 2.500.000.000,00 serta mempunyai perolehan setiap tahun melebihi Rp 300.000.000,00 hingga terbanyak Rp 2.500.000.000,00
3. Usaha Menengah
- a. Aset tidak sampai Rp 500.000.000,00 melebihi ataupun sama dengan Rp 10.000.000.000,00 serta memiliki harta bersih melebihi Rp 500.000.000,00 hingga terbanyak Rp 10.000.000.000,00 tidaklah meliputi pertanahan serta gedung usaha.
 - b. Omset melebihi Rp 2.500.000.000,00 tidak sampai ataupun sama dengan Rp 50.000.000.000,00 serta mempunyai penjualan setiap tahun melebihi Rp 2.500.000.000,00 hingga terbanyak Rp 50.000.000.000,00.

2.6.2 Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Bab III Pasal 4 serta 5 mengenai prinsip serta tujuan pemberdayaan UMKM ialah :

1. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip dari pemberdayaan UMKM adalah :

- a. Menumbuhkan rasa mandiri, bersama, serta berwirausaha UMKM guna berkarya melalui usaha sendiri.
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan publik yang transparansi, akuntabelitas, serta berkeadilan.
- c. Perkembangan usaha dengan basis potensi wilayah serta memiliki orientasi pasar selaras terhadap kompetensi UMKM.
- d. Pertumbuhan daya kompetitif UMKM; serta
- e. Pelaksanaan rencana, serta pengontrolan dengan terpadu.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah :

- a. Melaksanakan struktural ekonomi negara yang selaras, bertumbuh serta adil;
- b. Menumbuhkembangkan UMKM sebagai usaha yang tanggung serta mandiri; serta
- c. Memberikan peningkatan peranan UMKM pada pembangunan wilayah, pembentukan lapangan pekerjaan, pemerataan penghasilan, perkembangan perekonomian, serta pengentasan kemiskinan.

2.6.3 Asas dan Tujuan

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Bab II Pasal 2, UMKM mempunyai 9 asas, diantaranya :

1. Kekeluargaan

Asas kekeluargaan ialah yang menjadi landasan usaha pendayagunaan UMKM menjadi bagian dari ekonomi negara yang dilakukan menurut demokrasi ekonomi melalui pedoman kebersamaan, keefisienan, adil, berkesinambungan, mandiri, keseimbangan pertumbuhan, serta kesatuan perekonomian nasional guna kemakmuran semua penduduk Indonesia.

2. Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi adalah pendayagunaan UMKM dilakukan menjadi kesatuan melalui pembangunan ekonomi nasional guna meraih kesejahteraan khalayak.

3. Kebersamaan

Asas kebersamaan ialah yang memberikan dorongan peranan semua UMKM serta bidang usaha dengan bersaman dalam aktivitasnya guna meraih kemakmuran khalayak

4. Efisiensi berkeadilan

Asas ini menjadi landasan pelaksanaan pendayagunaan UMKM melalui mendahulukan efektivisasi berkeadilan dalam bisnis guna mendapatkan iklim usaha yang berkeadilan, kondusif, serta memiliki daya kompetitif.

5. Berkelanjutan

Asas berikut merupakan dengan tersusun mengusahakan terlaksananya tahapan pembagunan dengan pendayagunaan UMKM yang dilakukan dengan konsisten hingga tercipta ekonomi yang tangguh serta mandiri.

6. Berwawasan Lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah pendayagunaan UMKM yang dilaksanakan melalui tetap memperhatikan serta mendahulukan perlindungan serta penjagaan lingkungan hidup.

7. Kemandirian

Asas kemandirian adalah pendayagunaan UMKM yang dilaksanakan melalui tetap memelihara serta mendahulukan potensi, kesanggupan, serta independensi UMKM.

8. Keseimbangan Kemajuan

Asas ini adalah pendayagunaan UMKM yang berusaha memelihara keselarasan pertumbuhan perekonomian daerah pada kesatuan perekonomian nasional.

9. Kesatuan ekonomi nasional

Asas berikut ialah pendayagunaan UMKM yang adalah bagian dari pembangunan kesatuan perekonomian negara.

UMKM memiliki tujuan guna menumbuhkembangkan suatu usaha untuk membangun ekonomi nasional menurut demokrasi perekonomian yang adil.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Judul, Tahun	Variabel	Hasil
1.	<i>The Influence of Financial Literacy on Smes Performance Through Access to Finance and Financial Risk Attitude as Mediation Variables</i> (2020) Robert Jeyakumar., et al	Independen (X) : X1 : <i>Financial Literacy</i> X2 : <i>The Access of Finance</i> X3 : <i>Financial Risk Performance</i> Dependen (Y) : <i>Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Performance</i>	Hasil membuktikan bahwasanya Literasi keuangan memberi pengaruh signifikansi terhadap kinerja UMKM. Studi ini pun mendapati peranan mediasi akses finansial serta tindakan risiko finansial dengan hubungannya diantara literasi keuangan terhadap kinerja UMKM.
2.	<i>Financial Literacy And Growth Of Micro, Small, And Medium Enterprises In West Java, Indonesia</i> (2020) Marcellia Susan	Independen (X) : X1 : <i>Financial Literacy</i> X2 : <i>Access to Finance</i> Dependen (Y): <i>MSMEs Growth and Performance</i>	Perolehan studi menunjukkan bahwasanya literasi keuangan mempunyai dampak positif pada kinerja serta pertumbuhan UMKM. Hasil studi diharapkan memberikan saran bagi pemilik atau pengelola UMKM agar lebih memperhatikan literasi keuangan.
3.	<i>Loan repayment performance of micro and small-scale enterprise: evidence from North Wollo Zone, Ethiopia</i> (2022) Ebrahim Endris	Independen (X) : X1 : <i>Loan and business characteristics of MSEs</i> X2 : <i>Enterprise manager education level</i> X3 : <i>Collateral security</i> X4 : <i>Repayment period</i> X5 : <i>Loan utilization</i> X6 : <i>Financial Literacy</i>	Penelitian menemukan bahwa dari jumlah pelatihan terkait keuangan, ditemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengembalian pinjaman UMK pada tingkat signifikansi 1%. Efek positifnya adalah karena adanya literasi keuangan meningkatkan keterampilan dan sikap UMKM untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan laporan keuangan, yang meningkatkan kinerja pembayaran pinjaman perusahaan.

No.	Penulis, Judul, Tahun	Variabel	Hasil
		Independen (Y) ; <i>Loan repayment performance of SMEs.</i>	
4.	<i>Determinants of financial literacy: Empirical evidence from micro and small enterprises in India</i> (2021) Girijasankar Mallik., <i>et al</i>	Independen (X) : X1 : <i>General Financial Literacy</i> X2 : <i>Specific Financial Literacy</i> X3 : <i>Overall Financial Literacy</i> Dependen (Y) : <i>Micro and Small Entrepreneur</i>	Studi ini menemukan bahwa pengusaha melalui tingkatan pendidikan yang lebih tinggi mempunyai pengaruh signifikan terhadap semua jenis literasi keuangan. Penentu yang paling berpengaruh yang mempengaruhi keuangan literasi pengusaha ditemukan tingkat rasio laba kotor perusahaan. Lebih tinggi rasio laba kotor perusahaan, secara signifikan akan lebih tinggi tingkat ketiga jenis literasi keuangan para pengusaha.
5.	<i>The Effect of Financial Literacy and Financial Inclusion on MSMEs Performance</i> (2023) Mac Nhu Quynh., <i>et al</i>	Independen (X) : X1 : <i>Financial Literacy</i> X2 : <i>Financial Inclusion</i> Dependen (Y) : <i>MSMEs Performance</i>	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah dua indikator literasi keuangan yang paling signifikan. Sementara itu, koneksi dan kualitas merupakan indikator inklusi keuangan yang pengaruhnya paling signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja UMKM di Indonesia dapat terus ditingkatkan dengan meningkat literasi keuangan dan inklusi keuangan.
6.	<i>Financial literacy environment scan in Mozambique</i> (2021) Cossa., <i>et al</i>	Independen (X) : X1 : <i>Financial Attitude</i> X2 : <i>Financial Behaviour</i> Dependen (Y) : <i>Financial Literacy</i>	Perolehan penelitian menunjukkan bahwa 61% responden tidak menjawab pertanyaan terkait literasi keuangan, yang membuktikan bahwasanya tingkatan literasi keuangan di Mozambik masihlah minim yang berdampak pada proses pengambilan keputusan dan kesejahteraan keuangan mereka.
7.	<i>Improving MSME performance through financial literacy, financial</i>	Independen (X) ; X1 : <i>Financial Literacy</i>	Perolehan studi menunjukkan bahwasanya literasi keuangan, teknologi finansial, serta inklusi

No.	Penulis, Judul, Tahun	Variabel	Hasil
	<p><i>technology, and financial inclusion</i> (2022)</p> <p>Jufrizen., <i>et al</i></p>	<p>X2 : <i>Financial Technology</i></p> <p>X3 : <i>Financial Inclusion</i></p> <p>Dependen (Y) : <i>MSMEs Performance</i></p>	<p>finansial memberi pengaruh pada kinerja UMKM.</p>
8.	<p><i>Financial literacy of entrepreneurs: a systematic review</i> (2021)</p> <p>Anju Singla., <i>et al</i></p>	<p>Independen (X) :</p> <p>X1 : <i>Financial Literasi</i></p> <p>X2 : <i>Financial Access</i></p> <p>Dependen (Y) ; <i>MSMEs Performance</i></p>	<p>Hasil studi membuktikan bahwasanya literasi keuangan adalah kunci keberhasilan UMKM. Literasi keuangan yang buruk adalah salah satu alasan utama kegagalan UMKM, juga salah satu faktor yang menghambat UMKM untuk menggali berbagai sumber pembiayaan.</p>
9.	<p><i>Financial Literacy and Financial Performance of Small and Medium-sized Enterprises</i> (2022)</p> <p>Rubayah Yakob., <i>et al</i></p>	<p>Independen (X) :</p> <p>X1 : <i>Financial Literacy</i></p> <p>Dependen (Y) : <i>MSMEs Performances</i></p>	<p>Perolehan studi membuktikan bahwasanya literasi keuangan memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini meningkatkan konsistensi bukti yang ada pada kinerja UMKM dan memperluas cakupan yaitu dari Malaysia dan Indonesia karena terdapat perbedaan budaya, cara berfikir, hukum, bisnis, dan situasi politik.</p>

No.	Penulis, Judul, Tahun	Variabel	Hasil
10.	<p><i>The Impact of Financial Literacy on Performance and MSME Sustainability</i> (2022)</p> <p>Bojan Obrenovic., et al</p>	<p>Independen (X) :</p> <p>X1 : <i>Financial Literacy</i></p> <p>X2 : <i>Perfomance of MSMEs</i></p> <p>Dependen (Y) :</p> <p><i>Perfomance of MSMEs and Sustainability of MSMEs</i></p>	<p>Dalam penelitaian ini ditemukan bahwasanya Literasi Keuangan tidaklah memberi pengaruh pada Kinerja untuk seluruh UMKM bisa ditinjau melalui banyaknya segi kinerja lainnya yang memberi pengaruh. Sebagaimana perihalnya mutu SDM, kepaiawaian pelaku dalam pengelolaan pekerjaan, dan berdisiplin saat bekerja tersebut pun faktor yang memberi pengaruh pertumbuhan kinerja UMKM</p>
11.	<p><i>Financial services and firm performance, are there any differences by size? Worldwide evidence using firm-level data</i> (2021)</p> <p>Zakaria Elouaourti., et al</p>	<p>Independen (X) :</p> <p><i>Financial Services</i></p> <p>Dependen (Y) :</p> <p><i>Firms Perfomance</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pembiayaan perusahaan berbeda menurut ukurannya. Untuk mikro dan perusahaan kecil, ketersediaan pembiayaan internal berdampak positif pada kinerja mereka. Untuk perusahaan ukuran menengah, penggunaan utang membangkitkan kinerja perusahaan. Untuk perusahaan besar, efek positif utang berkurang seiring tingkat hutang meningkat, yang menyebabkan kategori perusahaan besar meningkatkan modalnya.</p>
12.	<p><i>Financial Inclusion And Growth Of Small And Medium Enterprises In Plateau State</i> (2021)</p> <p>(Johnpaul, 2021)</p>	<p>Independen (X) :</p> <p>X1 : <i>Financial Access</i></p> <p>X2 : <i>Financial Inclusion</i></p> <p>Dependen (Y) :</p> <p><i>Growth of SMEs in Plateau State</i></p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa UKM di Nigeria memiliki akses keuangan produk yang disiapkan perbankan serta lembaga finansial yang lain. Juga, finansial inklusi secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan UKM di Nigeria. Kesimpulannya, inklusi keuangan memainkan peran yang tak tergantikan dalam pertumbuhan UKM di Nigeria.</p>

No.	Penulis, Judul, Tahun	Variabel	Hasil
13.	<p><i>The effect of financial literacy and financial inclusion on performance MSMEs (2020)</i></p> <p>Abel Tasman., <i>et al</i></p>	<p>Independen (Y) :</p> <p>X1 : <i>Financial Literacy</i></p> <p>X2 : <i>Financial Inclusion</i></p> <p>X3 : <i>Internal Locus of Control</i></p> <p>Dependen (Y) :</p> <p><i>MSMEs Perfomance</i></p>	<p>Perolehan studi membuktikan bahwasanya literasi keuangan, inklusi keuangan, dan <i>internal locus of control</i> memberi pengaruh positif serta signifikansi pada kinerja UMKM.</p>
14.	<p><i>Finacial innovation and the performance of small and medium scale enterprises in Nigeria (2020)</i></p> <p>Lionel Effiom., <i>et al</i></p>	<p>Independen (X) :</p> <p><i>Financial Innovation</i></p> <p>Dependen (Y) : <i>MSMEs Perfomance</i></p>	<p>Perolehan studi membuktikan bahwasanya inovasi keuangan memberi pengaruh positif serta signifikansi pada produktivitas UKM pada Nigeria. Secara khusus, dari tujuh instrumen inovasi keuangan yang digunakan, semua kecuali satu ternyata dalam jangka pendek dan jangka panjang sebagai prediktor signifikan kinerja UKM di Nigeria.</p>
15.	<p><i>Commercial bank financing to micro, small, and medium enterprises (MSMEs): the mediating and multi-group effect analysis (2020)</i></p> <p>Amare Abawa., <i>et al</i></p>	<p>Independen (X) :</p> <p>X1 : <i>Bank Finance</i></p> <p>X2 : <i>Government Support</i></p> <p>X3 : <i>Behavioral Finance</i></p> <p>X4 : <i>Entrepreneur Competency</i></p> <p>Dependen (Y) : <i>MSMEs Perfomance</i></p>	<p>Perolehan studi membuktikan bahwasanya pengaruh total bank keuangan pada kinerja UMKM kurang dari efek langsungnya karena efek mediasi persaingan dari keuangan perilaku. Hasil juga mengungkapkan bahwa hubungan antara keuangan bank dan kinerja UMKM mempunyai efek negatif signifikansi dimoderasi oleh jenis kelamin pemilik dan ukuran Usaha. Itu hasilnya menyiratkan bahwa bank komersial harus (1) menilai perilaku pemilik-manajer dan (2) menghadapinya sebelum memberikan sanksi pinjaman untuk memastikan pemanfaatan dana yang diakses secara efisien</p>

No.	Penulis, Judul, Tahun	Variabel	Hasil
16.	<p><i>Financial Inclusion And Financial Literacy On Performance Sector And Micro Business Sustainability Small Medium (2021)</i></p> <p>Rulli., <i>et al</i></p>	<p>Independen (X) :</p> <p>X1 : <i>Financial Inclusion</i></p> <p>X2 : <i>Financial Literacy</i></p> <p>Dependen (Y) :</p> <p><i>Performance and Sustainability of MSMEs</i></p>	<p>Perolehan studi menunjukkan bahwasanya inklusi keuangan tidaklah memberi pengaruh pada kinerja serta kesinambungan UMKM. Adapun literasi keuangan memberikan pengaruh signifikansi pada kinerja serta berkesinambungan UMKM.</p>
17.	<p><i>Effect of Financial Technology on SMEs Performance in Cameroon amid COVID-19 Recovery: The Mediating Effect of Financial Literacy (2023)</i></p> <p>Claude., <i>et al</i></p>	<p>Independen (X) :</p> <p>X1 : <i>Financial Technology</i></p> <p>X2 : <i>Financial Literacy</i></p> <p>Dependen (Y) :</p> <p><i>MSME's Perfomance</i></p> <p>Mediating (M) :</p> <p><i>Financial Literacy</i></p>	<p>Hasil studi menunjukkan bahwa fintech serta literasi keuangan mempunyai hubungan positif serta signifikansi. Hasil juga mengungkapkan bahwa <i>FinTech</i> berpengaruh positif serta signifikansi pada kinerja UMKM. Studi ini menyimpulkan bahwasanya UMKM dapat meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan <i>FinTech</i> melalui literasi keuangan.</p>

No.	Penulis, Judul, Tahun	Variabel	Hasil
18.	<i>Examining the effect of financial accounting services on the financial performance of SME: The function of information technology as a moderator (2023)</i> Gyamera., et al	Independen (X) : <i>Financial Accounting Service</i> Dependen (Y) : <i>Sme's Financial Performance</i> Moderating (M) : <i>Information Technology</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan jasa akuntansi akan membantu UKM untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan jasa akuntansi untuk membuat laporan keuangan akan memungkinkan UKM untuk dapat memperoleh pinjaman. Teknologi informasi memiliki dampak positif pada kinerja finansial UKM.

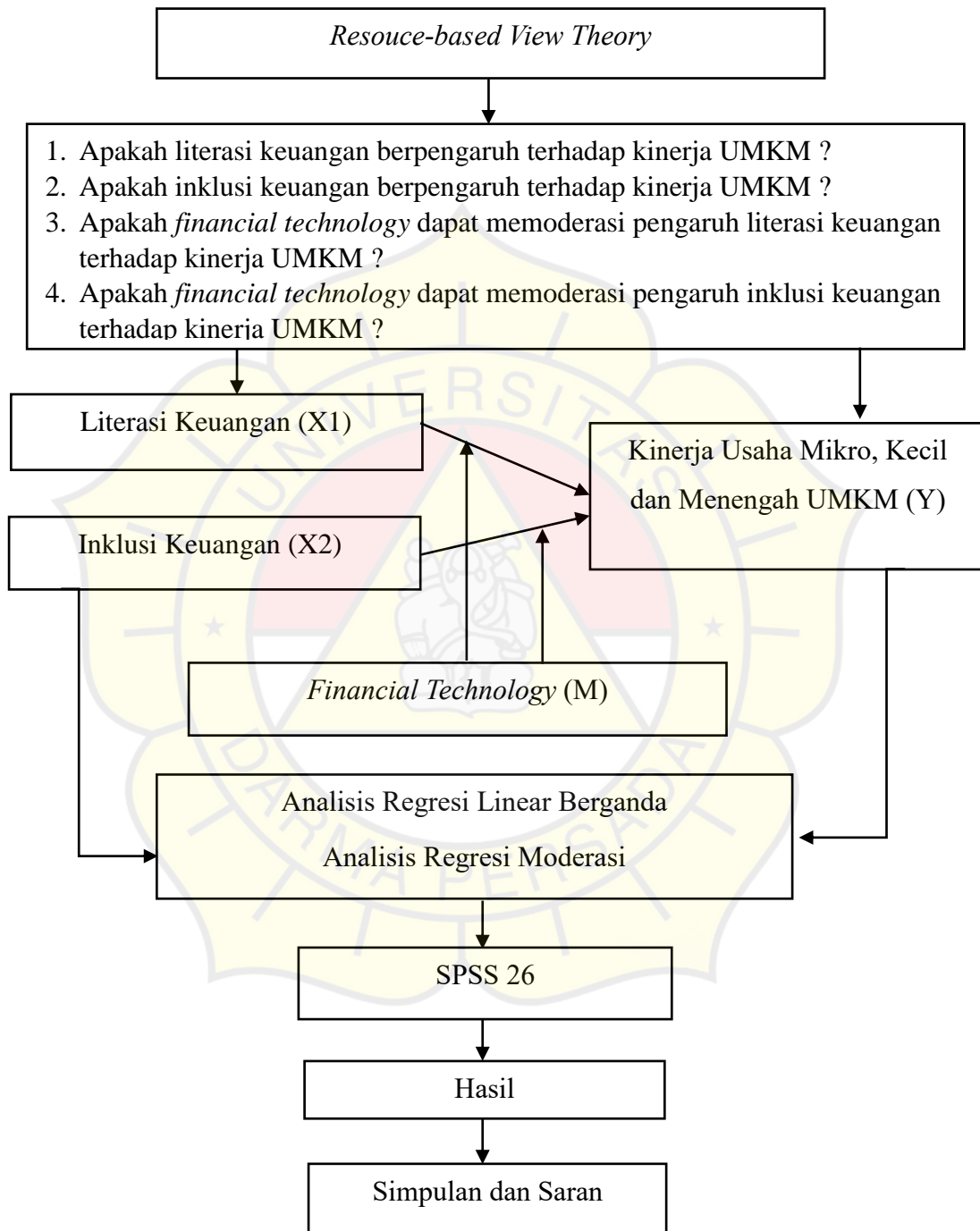
Sumber : Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh literasi keuangan serta inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM dengan *financial technology* sebagai variabel moderasi menunjukkan hasil yang beragam yang menimbulkan *research gap* yang membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk dilakukan penelitian lanjutan guna menguji kembali.

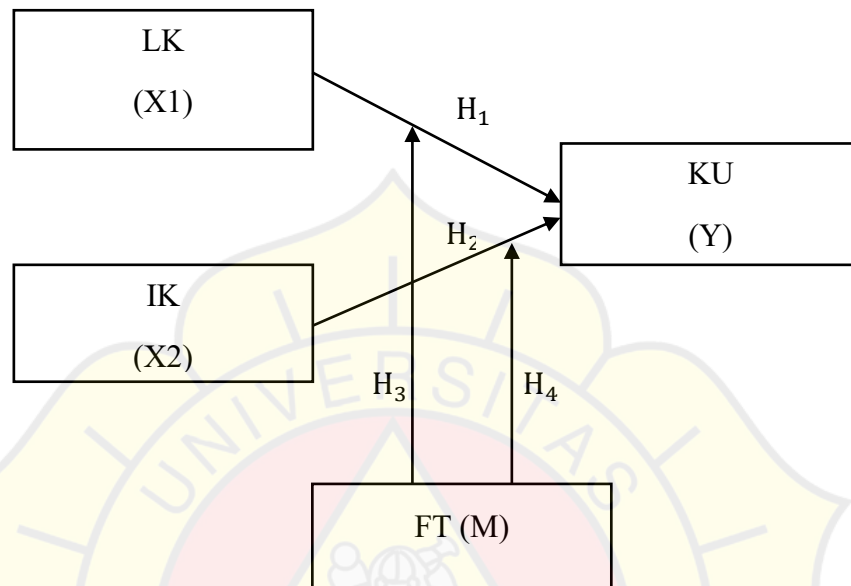
2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah uraian temporer terhadap gejala yang dijadikan objek masalah pada studi, dan menjadi representasi kerangka teori penuntasan permasalahan yang berasaskan kepada konsep ilmiah menjadi asas pembentukan kerangka pemikiran guna memberikan hasil hipotesis. Kemudian, kerangka pemikiran pun bersumberkan melalui studi terdahulu. Kerangka pemikiran yang dipakai pada studi ini bisa direpresentasikan berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Model Konseptual



Keterangan :

LK : Literasi Keuangan

IK : Inklusi Keuangan

KU : Kinerja UMKM

FT : *Financial Technology*

Kerangka konseptual tersebut guna membuktikan arah pembentukan dari metodeologi studi serta memberikan kemudahan dalam memahami serta menganalisa permasalahan, studi ini dilaksanakan guna mendapati literasi keuangan, inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM dengan *financial technology* sebagai variabel moderasi.

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau hipotesa ialah jawaban temporer pada permasalahan yang masihlah memiliki sifat dugaan dikarenakan masih harus ditunjukkan keabasahannya (Sugiyono, 2022). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, sehingga bisa dilakukan perumusan hipotesis studi di bawah ini:

2.10.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap kinerja UMKM

Menurut Anshika et al., (2021) pengusaha melalui tingkatan pendidikan yang lebih tinggi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap semua jenis literasi keuangan. Penentu yang paling berpengaruh yang mempengaruhi keuangan literasi pengusaha ditemukan tingkat rasio laba kotor perusahaan. Lebih tinggi rasio laba kotor perusahaan, secara signifikan akan lebih tinggi tingkat literasi keuangan para pengusaha. Selaras terhadap studi (Nathan et al., 2022) yang menunjukkan bahwasanya pengetahuan dan keterampilan ialah dua indikator literasi keuangan yang paling signifikan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya kinerja UMKM di Indonesia dapat terus ditingkatkan dengan meningkatkan literasi keuangan. Berbeda dengan (Yakob et al., 2021) yang menerangkan bahwasanya literasi keuangan tidak memberi pengaruh pada kinerja bagi UMKM, sehingga hipotesis di bawah dikembangkan :

H_1 : Literasi keuangan berpengaruh Positif terhadap kinerja UMKM.

2.10.2 Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM.

Menurut Effiom & Edet (2022) indikator inklusi keuangan (ATM serta uang elektronik) mempunyai kontribusi positif pada kinerja UMKM di Nigeria. Perolehan studi menunjukkan bahwasanya ATM, internet banking, cek, dan uang

seluler merupakan prediktor kinerja UMKM pada Nigeria. Selaras terhadap study (Johnpaul, 2021) yang menyatakan bahwa nasabah UKM sangat menerima inklusi keuangan dan hal ini pada gilirannya berdampak positif terhadap pertumbuhan UKM di Nigeria. Kesimpulannya, inklusi keuangan memainkan peran yang tak tergantikan dalam pertumbuhan UKM di Nigeria. Berbeda dengan (Esubalew & Raghurama, 2020) juga mengungkapkan bahwa hubungan antara keuangan bank serta kinerja UMKM memiliki efek negatif serta signifikan dimoderasi oleh jenis kelamin pemilik dan ukuran usaha, maka hipotesis berikut dikembangkan :

H₂ : Inklusi keuangan berpengaruh Positif terhadap kinerja UMKM.

2.10.3 Pengaruh Literasi Keuangan Yang Dimoderasi oleh *Financial*

Technology Terhadap Kinerja UMKM.

Financial technology berpotensi besar untuk memperlaju pembangunan perekonomian terkhusus yang berkaitan terhadap literasi keuangan (Brahmana et al., 2022). Sokongan pertumbuhkembangan TI menjadikan potensi *financial technology* dapat memberi kemudahan untuk mengakses sebuah informasi finansial dan pemahaman produk-produk keuangan (Fasano & Cappa, 2022). Lontchi et al., (2023) mengungkapkan bahwasanya *financial technology* serta literasi keuangan memiliki hubungan yang positif serta signifikansi, penelitian ini menyimpulkan bahwa UMKM dapat meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan *financial technology* melalui literasi keuangan.

H₃: Financial Technology dapat memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM.

2.10.4 Pengaruh Inklusi Keuangan yang Dimoderasi oleh *Financial*

Technology Terhadap Kinerja UMKM.

Inklusi keuangan berperan penting dalam meningkatkan standar hidup, *Financial technology* memainkan peran penting dalam hal meningkatkan efisiensi layanan dan menghemat sejumlah biaya transaksi yang disebabkan oleh penerapan jasa keuangan dari metode tradisional. *fintech* dapat memberikan kemudahan layanan keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan (Thathsarani & Jianguo, 2022). Penelitian (Thathsarani & Jianguo, 2022) juga menunjukkan bahwa *fintech* menjadi variabel moderasi secara signifikan bisa menguatkan korelasi positif antar manfaat yang dirasakan serta niat pembiayaan inklusi keuangan. Teknologi informasi menguntungkan UMKM dalam berbagai hal, termasuk berkurangnya operasional dan biaya administrasi, produktivitas yang lebih baik, operasi dan pertumbuhan bisnis yang lebih baik. UMKM dapat memperoleh perangkat lunak akuntansi yang dapat membantu mereka mencatat transaksi pelanggan dan dapat memungkinkan mereka untuk memastikan keuntungan mereka. penelitian Chen et al., (2022) menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki dampak positif pada kinerja UMKM yang mengartikan bahwa teknologi informasi menjadi salah satu kekuatan pendorong dari setiap bisnis.

H₄ : Financial technology dapat memoderasi pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM.